

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional diartikan sebagai hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan Internasional itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu bilateral yang merupakan hubungan antara dua negara dan multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara.

Indonesia yang merupakan negara berdaulat secara resmi dan hukum diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam hubungan Internasional dengan negara lain. Secara bebas aktif, Indonesia menjalin kerja sama dengan banyak negara dan ikut serta dalam keanggotaan organisasi-organisasi di dunia. Salah satu contoh hubungan Internasional bilateral adalah hubungan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat yang terwujud dalam peranan USAID di Indonesia.

USAID (*United States Agency for International Development*) adalah badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. USAID memiliki komitmen yang mendalam untuk bekerja sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan, USAID melakukan pemberdayaan dan memberikan dukungan melalui kerjasama.

USAID menitikberatkan fokus utamanya pada pembangunan bagi kepentingan bersama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kerja sama ini berawal dari tahun 2010, yang didasari oleh potensi yang dimiliki Indonesia namun belum terangkat dengan maksimal baik dalam segi sumber daya manusia maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak pertama kali menjalin kerja sama dengan USAID, Indonesia telah mampu menunjukkan perubahan yang signifikan baik dalam aspek pemerintahan, penurunan angka kemiskinan, infrastruktur, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia terus tumbuh hingga mencapai angka lebih dari 5 %.

Dengan banyaknya peningkatan yang terjadi hingga hari ini di Indonesia, peran USAID pun turut bertransformasi. Berawal sebagai pembina pengembangan teknologi dan reformasi inovasi, kini Amerika Serikat melalui USAID ikut serta berperan sebagai mitra pembangunan Indonesia.

Kemitraan Komprehensif yang ditujukan agar lebih intens dan meluas telah sepakat untuk dijalani oleh kedua negara ini bersamaan dengan penandatanganan perjanjian bilateral oleh Presiden Amerika Serikat yakni Barack Obama dan Presiden Republik Indonesia Yudhoyono pada 2010 lalu.

Kemitraan Komprehensif ini tidak lain juga merupakan bentuk apresiasi Amerika Serikat terhadap kesuksesan Indonesia yang mampu bangkit dan terus tumbuh sejak 50 tahun terakhir. Inti sari dari kesepakatan ini adalah ekonomi dan pembangunan, politik dan keamanan, dan sosial-budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Masih sesuai dengan visi Presiden Obama sejak tahun 2010 yakni untuk menyejahterakan negara-negara dengan penduduk dengan jumlah fantastis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, USAID terlibat dalam penguatan pengelolaan pemerintahan yang demokratis, peningkatan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi, integrasi dalam pembangunan infrastruktur, serta pembangunan yang bersifat global sebagai modal pelayanan mendasar bagi khalayak umum. Pada dasarnya, kerja sama ini bertumpu pada pembangunan di Indonesia yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan hingga sektor swasta agar terciptanya harmonisasi antara Pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. (*Harmonisasi Hubungan Internasional Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID, 2011*)

Indonesia terletak di episentrum Segitiga Terumbu Karang - area keanekaragaman hayati laut yang luar biasa termasuk perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste. Pada tahun 2007, Presiden Indonesia saat itu Yudhoyono memprakarsai kemitraan multilateral untuk melindungi sumber daya hayati laut dan pesisir yang luar biasa di kawasan ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga Indonesia disebut sebagai negara “Zamrud Khatulistiwa”. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi peluang untuk memajukan perekonomian Indonesia. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia yang dapat menjadi penggerak perekonomian dan

menjadi peluang pasar bagi Indonesia. (*Kekayaan Alam Indonesia Yang Mendunia*, 2012)

Indonesia dikenal pula sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam spesies laut. Mulai dari terumbu karang, rumput laut, bakau, perikanan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelestarian sumber daya alam laut di Indonesia ini, masih banyak terdapat masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pemerintah Indonesia. Contohnya diantara banyaknya kekayaan alam itu, pemerintah masih belum mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembangunan nasional. Pasalnya, hingga kini nelayan dan masyarakat pesisir masih belum mampu sejahtera secara ekonomi.

Di sisi lain terkait terumbu karang yang terancam punah akibat dari metode penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Dampak dari metode penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan dapat mengurangi populasi ikan. Kondisi terumbu karang Indonesia secara umum adalah 5 persen berstatus sangat baik, 27,01 persen dalam kondisi baik, 37,97 persen dalam kondisi buruk, dan 30,02 persen dalam kondisi jelek. Sekitar 67,99 persen terumbu karang di Indonesia berstatus tidak baik. (*Inilah Status Terumbu Karang di Indonesia Terkini*, 2012) Selain itu, adapun Sembilan spesies laut yang mulai terancam punah yakni Dugong atau Duyung, Pesut, Penyu, Hiu Paus, Kuda Laut, Kima, Lola, Tripang, dan Napoleon akibat dari penggunaan alat tangkap yang kontradiktif serta mengambil/menangkap spesies laut yang dilindungi. Ada pula beberapa faktor lain yang mengancam populasi spesies ikan yang dilindungi.

Diantaranya faktor maraknya pembangunan wilayah pesisir atau reklamasi lahan pantai, tidak tertatanya pembangunan pemukiman penduduk, menjamurnya pembangunan resort dan terminal ferry internasional, pembuangan limbah minyak hitam yang dilakukan kapal-kapal tanker ketika melintasi perairan internasional, kecelakaan lalu lintas laut, dan pembuangan sampah sembarangan di laut. Sehingga KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan laut yang kompleks dan signifikan.

Maka dari itu, pada 5 Juli 2012 pemerintah Indonesia dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau *United States Agency for International Development* (USAID) bekerjasama dalam program konservasi laut sebagai upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di Indonesia melalui kerangka program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG). MPAG merupakan bagian dari komitmen USAID guna mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan kebijakan program konservasi perairan di Indonesia. MPAG ini merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya merealisasikan target kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan Indonesia sebesar 20 juta hektar di tahun 2020. Dalam pengembangan kawasan konservasi ini selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya aktifitas ekonomi baru yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy). (*Indonesia-AS Kembangkan Kerjasama Konservasi Laut Nusantara*, 2012)

MPAG tumbuh dari USAID *Mission Development for Asia* (RDMA) program *Coral Triangle Support Partnership* (CTSP). CTSP adalah program lima tahun senilai \$ 32 juta yang berfokus pada konservasi laut di seluruh wilayah Segitiga Karang atau *Coral Triangle* yang mencakup perairan dan garis pantai Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Diprakarsai pada 2008, CTSP dipimpin oleh WWF AS dan termasuk konsorsium *Conservation International*, *The Nature Conservancy*, dan Kantor WWF di wilayah tersebut. USAID Indonesia mendirikan proyek CTSP-I (*Coral Triangle Support Partnership-Indonesia*). Di bawah CTSP-I, pendekatan berbasis sains untuk mengidentifikasi prioritas dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan efektivitas, manfaat, dan cakupan MPA diperkenalkan kepada KKP untuk meningkatkan konservasi laut di seluruh Indonesia melalui pembentukan sistem dan kebijakan MPA nasional, adopsi manajemen MPA nasional protokol efektivitas, dan untuk memberikan kemajuan signifikan dalam pembentukan dan penguatan MPA, memulai jaringan MPA dan konseptualisasi indikator ekosistem untuk pendekatan berbasis ekosistem (EAFM) untuk pengelolaan perikanan. KKP mengadopsi EAFM ini selama tiga tahun, dengan MPAG memberikan dukungan untuk implementasinya.

MPAG melanjutkan pekerjaan CTSP-I, meningkatkan dan membangun keluarannya dengan memperkuat efektivitas MPA, memperluas sistem MPA menuju target 20 juta ha yang ditargetkan pemerintah Indonesia, memperdalam integrasi antara intervensi yang didanai proyek dan kerangka kerja KKP, dan dengan memadukan dengan mulus upaya gabungan para mitra

ke dalam pendekatan proyek yang luas dan berkelanjutan untuk seluruh sistem.

Sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta ha atau 77,5 persen. Kawasan konservasi perairan itu, dapat dicapai melalui pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Sehingga sumber daya laut dan perikanan dapat menjadi tumpuan hidup bagi nelayan di wilayah pesisir, serta mampu menjadi penggerak utama bagi pembangunan nasional di masa depan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengupayakan sebuah pembentukan mekanisme pengelolaan dana berkelanjutan guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Adapun pembentukan mekanisme ini ditujukan untuk mempermudah dalam mengelola dana bantuan hibah dari para mitra seperti USAID ini, sehingga pemanfaatannya dapat lebih transparan, fokus dan tepat sasaran. USAID telah memberikan kontribusi sejumlah 6 juta dolar AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan kawasan konservasi seluas 20 juta ha. (*Indonesia-AS Kembangkan Kerjasama Konservasi Laut Nusantara*, 2012)

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “ **Kerjasama RI – USAID melalui Program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) untuk Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerjasama Republik Indonesia dan USAID ?
2. Bagaimana kebijakan kelautan dan perikanan yang telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia ?
3. Bagaimana program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia ?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu Kerjasama RI – USAID melalui program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia pada tahun 2009 – 2015.

1.2.2 Perumusan Masalah

Setelah melalui pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka untuk memperjelas masalah yang diteliti, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi program kerjasama *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) RI – USAID dapat melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program kerjasama antara Republik Indonesia dan USAID.
2. Untuk mengetahui kebijakan kelautan dan perikanan yang telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi program *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk kemaslahatan umat, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk pembaca agar pembaca mengetahui tentang konservasi laut di Indonesia dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat.
2. Untuk instansi atau forum kebijakan, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun para pengambil keputusan baik di pemerintahan ataupun pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan masalah kelautan maupun organisasi internasional.
3. Untuk akademis, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

khususnya konservasi laut atau organisasi internasional sehingga dapat dijadikan masukan, referensi serta perkembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

4. Untuk penulis, penelitian ini sebagai salah satu media untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikannya dalam bentuk tulisan, dan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah praktikum profesi studi hubungan internasional program strata-1 (S1) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan.